

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

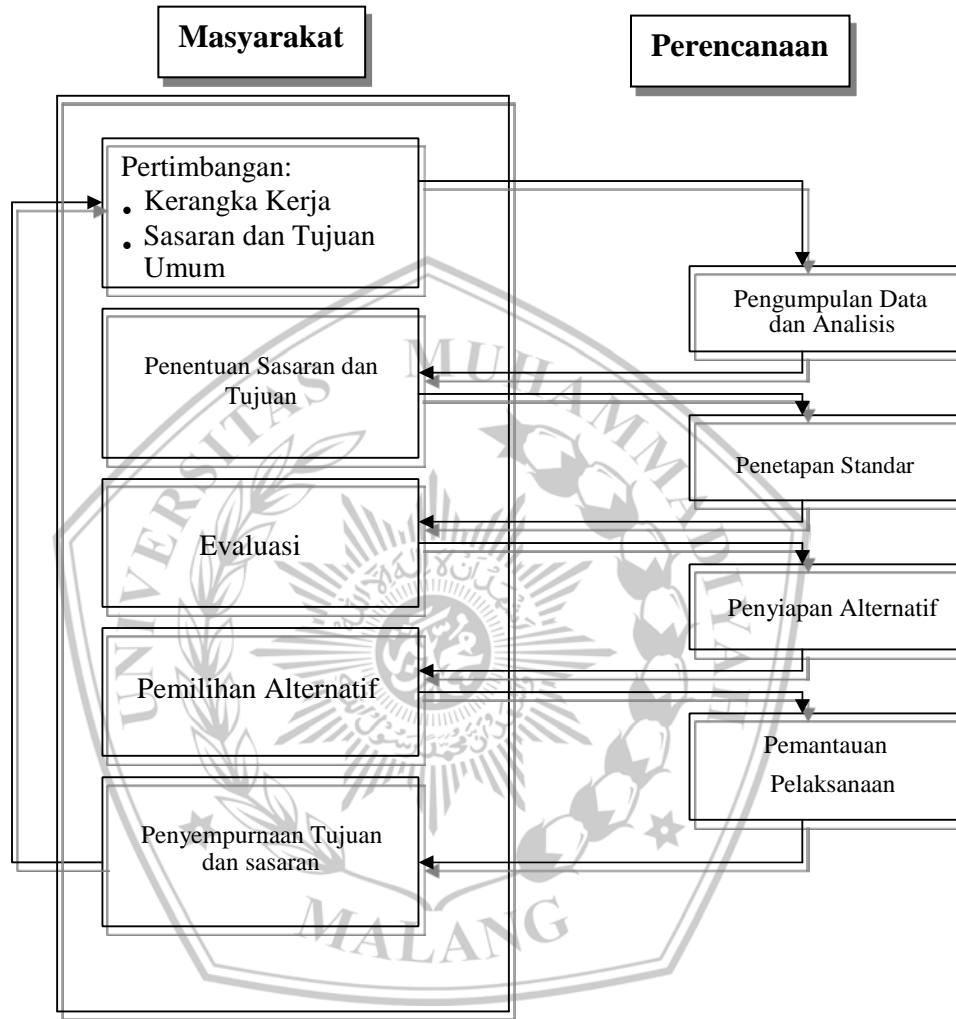
A. Partisipasi Masyarakat

Asal usul kata partisipasi dari bahasa Inggris, yakni “*participation*” yang berarti keikutsertaan atau mengambil bagian. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang oleh Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan peran serta, keikutsertaan. Berdasarkan pengertian partisipasi ini maka dapat diketahui bahwa dalam pemerintahan yang terbuka, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat bukan saja sebagai ditempatkan sebagai objek pembangunan, tapi subjek pembangunan, disertakan dalam proses pembangunan bahkan sejak dari perencanaan sampai pengelolaan pembangunan.

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat dimaknai sebagai tindakan proaktif dalam mengawasi setiap aktivitas pembangunan dimulai dari pengawasan perencanaan pembangunan hingga capaian pembangunan. Diperlukan suatu Perencanaan partisipatif dimana bertujuan untuk mengintegrasikan aktivitas perencanaan dengan kegiatan masyarakat. Berikut adalah penggambaran perencanaan partisipatif.

Gambar 2

**Peluang Partisipasi Masyarakat dalam
Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program**



Sumber: Robert (dalam Soemarmo, 2005)

Gambar di atas menerangkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi arah kebijakan dan program pemerintah melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari dipilihnya kebijakan alternatif dan pembuatan program sementara, hingga penetapan sasaran, tujuan dan kebijakan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penetapan tujuan dan sasaran serta perumusan kebijakan yang akan dibuat merupakan konsekuensi logis

reformulasi konsep pembangunan yang partisipatif memuat ekspresi dan aspirasi masyarakat.¹

1. Substansi Dari Partisipasi

Substansi dari partisipasi sering dimaknai sebagai nilai dasar yang melekat pada semangat partisipasi masyarakat. Dengan kata lain setiap kebijakan tidak dapat dilaksanakan tanpa melalui proses persetujuan dari rakyat. Hal tersebut beranjak dari nilai dasar bahwa kebijakan yang dibuat akan berdampak langsung pada masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adanya pengembangan partisipasi adalah sebagai berikut:

“Pertama, bahwa partisipasi akan memberi memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam tinjauan literatur klasik diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan, dimulai dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan. sementara itu, dalam pemaknaan substantif partisipasi

¹ *Ibid*, Sumber Soemarmo, 2005. hal 32

dimaknai dalam tidak rangkaian kata: *voice*, *akses* dan *control*. Adapun arti dan pengertian masing-masing yaitu:

1. *Voice*

Voice adalah tindakan menentukan pilihan dan sikap oleh masyarakat berbentuk usulan pendapatan, gagasan, argumen, aspirasi, opini dan tuntutan, kepada pembuat kebijakan maupun kebijakan pemerintah.

2. *Akses*,

Akses diartikan sebagai tindakan terlibat secara aktif dalam memengaruhi kebijakan dan mengelola barang-barang publik.

3. *Control*,

Control adalah tindakan pengawasan dari masyarakat atas jalannya pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin jalannya pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik dengan transparan, akuntabel dan responsif.

2. Perencanaan Partisipasi

Wicaksono dan Sigiarto,² berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah ikhtiar pemecahan masalah yang dihadapi melibatkan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara yang dimiliki. Adapun menurut keduanya bahwa perencanaan partisipatif memiliki ciri-ciri yaitu:³

1. Fokus pada kepentingan masyarakat;

- a. Program direncanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat dan masalah yang dihadapi masyarakat.

²Suwandi. 2012. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Ciribon. Jurnal Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 4*

³*Ibid.*

- b. Aktivitas perencanaan memperhatikan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa dilandasi keterbukaan dan saling percaya.

2. Partisipatoris

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengemukakan aspirasi dalam bentuk sumbangan pemikiran tanpa dihambat apapun.

3. Dinamis;

- a. Pertimbangan dilakukan untuk semua kepentingan dan kebutuhan setiap pihak.
- b. Aktivitas perencanaan dilaksanakan secara terus-menerus dalam bersifat proaktif.

4. Sinergitas;

- a. Memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam aktivitas perencanaan.
- b. Memastikan koneksifitas kerjasama antar wilayah baik secara administrasi maupun geografis.
- c. Perencanaan dilakukan tanpa menghilangkan model sebelumnya yang memiliki kesamaan tujuan pembangunan.
- d. Interaksi antara *stakeholders* sangat diperhatikan

5. Legalitas;

- a. Setiap peraturan yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan digunakan sebagai pedoman perencanaan.
- b. Perencanaan berlandaskan nilai-nilai etik dalam tatanan masyarakat setempat.
- c. Menghindari terjadinya Penyalangunaan wewenang.

6. Fasibilitas

Aktifitas perencanaan mempertimbangkan waktu, bersifat spesifik, dan terukur.

Empat kriteria yang digunakan dalam Perencanaan partisipatif yaitu:⁴

1. Seluruh *stakeholders* dilibatkan dalam perencanaan.
2. Partisipasi dilakukan dalam suatu wadah yang terlembaga dan terlegitimasi.
3. Memungkinkan prosesi negosiasi dalam melakukan aktivitas perencanaan, akan tetapi tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan kolektif.

B. Perencanaan Pembangunan

Menurut GR Terry Perencanaan adalah aktivitas memilah dan menemukan titik temu dari fakta-fakta temuan, selanjutnya membangun asumsi dasar sebagai acuan merumuskan kegiatan hingga capaian akhir yang diinginkan. Sementara itu menurut Billy E Gooetz, perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan dengan estimasi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁵

Sementara itu, menurut Djojonegoro, hakekat pembangunan adalah adanya transformasi keadaan masyarakat menuju keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Dalam transformasi tersebut dibutuhkan dua hal, yakni *continuity* (keberlanjutan) dan *change*

⁴Asri Lubis. 2009. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol. 6, No. 2, Desember 2009. Hal. 189

⁵Sutadji. 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Dee Publish, Yogyakarta. Hal. 9

(perubahan). Dinamika antar kedua hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berkembang.⁶

1. Prioritas Perencanaan Pembangunan

Lembaga Administrasi Negara⁷ mendefinisikan perencanaan sebagai kegiatan terus menerus dalam memilih prioritas dan cara atau alternatif mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan. Perencanaan (*planning*) merupakan “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai caracara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.”⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pada prinsipnya menjadi sarana dalam menentukan pilihan yang tepat dan terarah, efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan di masa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa fungsi perencanaan yaitu menjadi sarana dalam menentukan pilihan yang tepat dan terarah, efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan di masa depan, dalam kaitannya dengan pembangunan maka perencanaan menjadi pranata dalam melakukan estimasi rinci atas seluruh masalah, seluruh kebutuhan, seluruh daya guna dan hasil guna, hingga pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain pembangunan akan terarah, efektif dan efisien apabila dibangun dari perencanaan yang baik dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana perencanaan yang baik, pembangunan dalam

⁶Rauf A. Hatu. 2013. *Sosiologi Pembangunan*. Interpena, Yogyakarta. Hal. 6

⁷ Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta. hal 4

⁸ Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta . hal 3

perencanaan memiliki posisi yang sama sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konsep yang tertuang di atas kertas, akan tetapi juga melihat kondisi di lapangan. Data yang akurat dari lapangan merupakan hal yang penting dalam menyusun rencana pembangunan. Oleh karenanya perencanaan pembangunan merupakan perumusan keputusan yang berdasarkan pada data dan kondisi di lapangan dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan pelayanan publik baik dalam bentuk infrastruktur maupun supratruktur.

2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Di Indonesia, pada pertengahan 1980-an, perencanaan pembangunan yang tertata sudah diimplementasikan. Tatacara pembangunan yang digunakan antara lain yaitu kombinasi dari “*bottom up approach*” (pendekatan dari bawah) dengan “*top down approach*” (pendekatan dari atas). Konsekwensinya adalah menghasilkan enam tahap yang harus digunakan, mulai dari tahapan musyawarah pembangunan desa, diskusi unit kerja pada tingkat kecamatan, selanjutnya melakukan rapat koordinasi pembangunan dalam tingkatan yang lebih tinggi pada kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Hingga konsultasi nasional (*konasbang*).⁹

Otonomi daerah telah mendapat perhatian dan keluasaan, khususnya dilingkup kabupaten atau kota. Konsekwensinya akan menuntut meningkatnya kemampuan pengelolaan administrasi daerah, mulai dari perumusan kebijakan sampai pada

⁹<http://mukhlisbima.blogspot.com/2014/01/rancangan-penelitian.html>

implementasi program yang diarahkan untuk pembangunan. Sebagai sebuah rangkaian tuntutan otonomi daerah, masyarakat local menjadi motor penggerak model pembangunan dimasa depan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dibutuhkan model pembangunan berparadigma partisipatif mengganti model pembangunan dari atas.

Model pembangunan partisipatif akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik, tepat waktu, tepat sasaran, bahkan berdaya guna dan berhasil guna, karena melibatkan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sebagai unsur penting dalam pembangunan partisipatif, masyarakat akan lebih mampu memahami persoalan yang dihadapi dan dimiliki pada wilayahnya, bahkan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat akan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akhirnya kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam memperbaiki daerah melalui program-program pembangunan terlaksana dengan dan tanpa paksaan.¹⁰

3. Pembangunan Desa

Sutoro mengemukakan bahwa, pembangunan desa menjadi suatu langkah kongkrit dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendasari dilakukannya pembangunan melalui desa oleh pemerintah dibantu partisipasi masyarakat. Teori ini menjadi dasar pijakan peneliti dalam membedah permasalahan pembangunan desa.¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ni Putu Indriyani. 2017. *Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan)*. Citizen Chatrter. Universitas Udayana, Denpasar. Hal. 1

Sebagai konsekwensinya, proses perencanaan pembangunan desa harus disesuaikan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Akan tetapi Desa memiliki kewenangan sendiri dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan Desa dan menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Proses perumusan pembangunan desa tersebut dilaksanakan dengan musyawarah. Hasilnya adalah penetapan kebijakan pembangunan Desa dengan didanai atas APBDesa. Apabila dana yang diestimasikan kurang dari estimasi anggaran yang dibutuhkan maka masyarakat akan melakukan swadaya dengan berdasar pada penilaian masyarakat Desa. Lain halnya dengan pelaksanaan pembangunan Desa, tidak ada campur tangan dari pihak luar, artinya seluruh aktivitas pembangunan diserahkan untuk pemerintah desa dan juga masyarakat desa, proses pembangunan dilakukan sesuai kearifan lokal yang mana berdasarkan prinsip dan semangat gotong royong. Selain itu dalam hal monitoring pembangunan Desa, masyarakat Desa memiliki hak penuh dalam memantau proses kerja hingga hasil kerja pembangunan Desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 79 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa, pertama, Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan berdasarkan kewenangannya serta mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Kedua, Perencanaan Pembangunan Desa disusun bertahap yaitu: Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan setelah itu, Rencana Pembangunan tahunan yang merupakan pengejawantahan dari rencana pembangunan jangka menengah (1 tahun). Peraturan Desa mementapkan kedua rencana tersebut. Dimana, Peraturan Desa tentang kedua rencana tersebut menjadi satu-

satunya dokumen tentang perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis Ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan RPJMDesa dan/atau RKPDesa dibahas dan disepakati dalam musyawara perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.¹²

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa harus diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Mulai dari menyusun perencanaan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Sampai pada menetapkan prioritas, Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Pembangunan Desa, model pendanaan oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, atau oleh APBD Kabupaten/Kota. Bahkan membuat keputusan terkait prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan mendesak yang harus dikerjakan di Desa. Dengan kata lain setiap aktivitas harus melibatkan masyarakat selaku pihak yang memiliki kepentingan paling mendasar yaitu.¹³

- a. Meningkatkan mutu dan akses terhadap pelayanan paling dasar;
- b. Menyesuiakan antara aktivitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan dengan ketersediaan kemampuan teknis dan sumber daya lokal;
- c. Produktifitas menjadi skala prioritas dalam Pengembangan ekonomi pertanian Desa;

¹² Lihat pasal 120 PP No. 43 tahun 2014.

¹³ Lihat Pasal 80 UU No. 6 tahun 2014.

- d. Kebutuhan masyarakat akan kemajuan ekonomi melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan haruslah dimulai dengan memadukan pembangunan antara Desa dalam satu Kabupaten/Kota, hal ini penting dalam rangka menyelaraskan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan Desa, meskipun demikian tanpa bermaksud menyeragamkan perbedaan kebutuhan setiap Desa. Untuk dapat melaksanakannya perlu dilakukan pembahasan terintegrasi dalam mengkaji perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan bersama Pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintahan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:¹⁴

- a. Penetapan kawasan pembangunan wilayah Desa merujuk pada tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan meliputi Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- c. Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Desa melalui meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

¹⁴ Lihat Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 tahun 2014

Rencana pemangunan Kawasan Pedesaan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintahan Desa.¹⁵

Pembangunan kawasan Pedesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa. Perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Pedesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁶

Dalam sistem otonomi, Pemerintah melakukan pembangunan pada Kawasan Pedesaan melalui tugas pembantuan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam SKPD. Sementara itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia serta mengikutsertakan pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Akan tetapi apabila pembangunan Kawasan Pedesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antara Desa.¹⁷

Pembangunan kawasan pedesaan meliputi: Penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan yang berorientasi partisipatif; b. pengembangan secara terpadu; c. menguatkan kapasitas masyarakat; d. pelebagaan dan kerjasama ekonomi; dan e. peningkatan

¹⁵ Lihat Pasal 83 ayat 4 dan 5 UU No. 6 tahun 2015

¹⁶ Lihat Pasal 84 UU No. 6 tahun 2014

¹⁷ Lihat Pasal 85 UU No. 6 tahun 2014

infrastruktur antar pedesaan.¹⁸ Hak asal-usul dan kewenangan local menjadi fondasi pembangunan kawasan pedesaan. Selain itu melakukan pendampingan atas hak keadilan sosial guna mencegah kerugian seluruh dengan dengan langkah pencegahan dampak social dan lingkungan.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, Bupati/Walikota menetapkan lokasi wilayah pembangunan kawasan perdesaan. Lokasi pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan mekanisme:

- a. Usulan penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, hingga sarana dan prasarana desa.
- b. Bupati/Walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan usulan penetapan desa.
- c. Kajian atas usulan dilakukan oleh Bupati/Walikota guna disinergikan dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- d. Bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Pengusulan program pembangunan kawasan di lokasi oleh Bupati/Walikota telah ditetapkan pemerintah melalui gubernur. Program pembangunan akan ditetaokan sebagai program pembangunan nasional setelah dibahas bersama pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa memperoleh sosialisasi program tersebut dari

¹⁸ Lihat Pasal 123 ayat 2 PP No. 43 tahun 2014

¹⁹ Lihat Pasal 123 ayat 3 PP No. 43 tahun 2014

Bupati/walikota melalui Badan Musyawarah Desa, disaksikan masyarakat. Sementara itu, Pembangunan berskala lokal desa dialih tugaskan pada Desa.²⁰

C. Dinamika Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014

1. Kewenangan Desa

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi akan tetapi dalam perkembangannya beralih menjadi asas rekognisi, dan subsidiaritas, hal tersebut tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan: 1) rekognisi, yaitu pengakuan Desa mempertimbangkan hak asal usul; 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan keputusan tertinggi untuk kepentingan masyarakat Desa dilakukan secara lokal; 3) keberagaman, yaitu mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di Masyarakat Desa; 4) kebersamaan, yaitu membangun Desa melalui partisipasi dan kerja sama antar lembaga desa dan masyarakat dilandasi prinsip saling menghargai; 5) Gotong Royong, yaitu Membangun Desa dengan semangat saling tolong menolong; 6) Kekeluargaan, yaitu memegang prinsip satu bahwa masyarakat desa adalah satu kesatuan kekeluargaan; 7) musyawarah, yaitu Diskusi dengan berbagai pihak menjadi langkah pengambilan keputusan Masyarakat Desa; 8) demokrasi, yaitu harkat dan martabat sebagai keluhuran manusia melandasari setiap keputusan bersama masyarakat desa; 9) Kemandirian, yaitu Menciptakan masyarakat Desa yang berdikari; 10) Partisipasi, yaitu keterlibatan yang proaktif dalam setiap kegiatan; 11) Kesetaraan, yaitu kedudukan dan peran yang sama dan dilindungi hukum; 12) Pemberdayaan, yaitu kegiatan mewujudkan taraf hidup

²⁰ Lihat Pasal 124 PP No. 43 tahun 2014

masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya; dan 13) Berkelanjutan, yaitu Membuat program pembangunan yang dapat memastikan berkesinambungan Desa.²¹

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan adat istiadat Desa, Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan local berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Desa memiliki kewenangan dalam mengurus kehidupannya sendiri sesuai hak Asal Usulnya. Selain itu, Pemerintah memberikan Desa kewenangan untuk melaksanakan tugas baik tugas pokok maupun tugas lain sebagai bentuk partisipasi terhadap pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/Kota.²²

Bentuk Penugasan yang diberikan kepada Desa meliputi: Menyelenggarakan urusan pemerintah Desa, Melaksanakan setiap kegiatan Pembangunan Desa, Ikut serta dalam

²¹ Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014.

²² . Lihat pasal 34 ayat 1 PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul minimu terdiri dari: a, sistem organisasi masyarakat adat; b, pembinaan kelembagaan masyarakat; c, pembinaan lembaga dan hukum adat; d, pengelolaan tanah kas desa; dan e, pengembangan peran masyarakat desa

membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Adapun setiap tugas memiliki pembiayaan yang telah direncanakan.²³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendanai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kewenangan desa sesuai hak asal usul Lokal., Selain itu jika diperlukan dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bentuk pendanaannya memiliki mekanisme tersendiri yaitu didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga kemudian ditransfer melalui SKPD kabupaten/Kota. Mekanisme pembiayaan yang sama apabila didanai oleh APBD.

2. Peran Lembaga Permasyarakatan Desa

Desa membentuk rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karangtaruna atau dengan pemberian nama lain menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga tersebut ditugaskan untuk membantu pemerintah Desa bahkan menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 94 UU No. 6 tahun 2014 bahwa Proses pembantuan fungsi pemerintah desa berbentuk untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas dari lembaga kemasyarakatan Desa. Dengan sasaran yaitu peningkatan pelayanan

²³ Lihat pasal 34 PP No. 43 ayat 2 tahun 2014. Bahwa Kewenangan local berskala desa minimum terdiri atas kewenangan atas: a, pengelolaan tambahan perahu; b, pengelolaan pasar desa; c, pengelolaan tempat pemandian umum; d, pengelolaan jaringan irigasi; e, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; I, pengelolaan lumbung desa; j, pengelolaan air minum berskala desa dan; k pembuatan jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian.

terhadap masyarakat desa. Siap pelaksanaan program dan kegiatan diharuskan untuk memberdayakan setiap lembaga yang sudah ada di Desa.²⁴

Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan diatur peraturan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi:²⁵

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Memastikan bahwa kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa meningkat;
4. Memastikan bahwa hasil pembangunan secara partisipatif, berarti setiap proses penyusunan rencana, hingga evaluasi diikuti oleh masyarakat desa;
5. Memastikan bahwa proses pembangunan dilandasi prinsip gotong royong dan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh masyarakat Desa setempat;
6. Memastikan bahwa kesejahteraan keluarga meningkat; dan
7. Memastikan kualitas sumber daya manusia meningkat.

Akhirnya lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah dalam melakukan aktualisasi kemampuan seluruh masyarakat desa melalui media partisipasi. Dengan harapan bahwa pemberdayaan akan mengarah pada terwujudnya kehidupan demokrasi dan transparansi di masyarakat desa. Pada akhirnya kegiatan pembangunan bermuara pada terciptanya akses yang bagi setiap orang secara adil.

²⁴ Lihat juga Pasal 150 dan Pasal 151 PP No 43 tahun 2014

²⁵ Lihat Pasal 150 ayat 3 PP No. 43 tahun 2014

